

# **Peran Agama Hindu Dalam Menolak Reklamasi Bali**

## **Studi Kasus: Tanjung Benoa, Bali**

### **Pengantar**

Lingkungan hidup merupakan sumber penting dalam menjamin kelangsungan dan kelestarian hidup manusia dan organisme lainnya di muka bumi. Semakin hari dari waktu ke waktu terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh manusia melalui aktivitas-aktivitas manusia yang secara tidak langsung menimbulkan dampak yang besar bagi kelangsungan hidup manusia, serta makhluk hidup lainnya. Pencemaran lingkungan dewasa ini merupakan permasalahan yang sering terjadi pada banyak tempat di dunia. Pada umumnya, pencemaran lingkungan sering kali terjadi pada Negara-negara berkembang atau Negara dunia ke tiga. Pencemaran lingkungan juga terjadi di Indonesia yang tergolong pada Negara berkembang. Pencemaran lingkungan yang terdapat di Indonesia seperti pencemaran udara, air atau laut, dan pencemaran tanah.

Menurut SK menteri Kependudukan Lingkungan Hidup No 2/MENKLH/1988 masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi dan atau komponen lain ke dalam air/udara dan atau berubahnya tatanan (komposisi) air/udara oleh kegiatan manusia dan proses alam, sehingga kualitas air atau udara menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya pencemaran lingkungan terjadi apabila daur materi dalam lingkungan hidup mengalami perubahan, sehingga keseimbangan struktur maupun fungsinya terganggu<sup>1</sup>. Pencemaran lingkungan di Indonesia ini terjadi karena akibat dari pembangunan yang tidak melihat kondisi lingkungan. Karena pembangunan yang tidak memperhatikan lingkungan tersebut, membuat beberapa kalangan masyarakat memprotes kegiatan pembangunan tersebut. Hal ini dilakukan kalangan masyarakat tersebut karena banyak menimbulkan kerugian.

Kebutuhan yang meningkat merupakan akar mula dari pencemaran yang dilakukan oleh manusia. Demi mencapai kebutuhannya manusia rela melakukan apapun termasuk mencemarkan lingkungan. salah satu contohnya yaitu kasus reklamasi pantai Tanjung Benoa, di Bali. Tujuan

---

<sup>1</sup> Dilihat di SK menteri Kependudukan Lingkungan Hidup No 2/MENKLH/1988

dari reklamasi tanjung benoa adalah untuk meningkatkan daya saing dalam bidang destinasi wisata dengan menciptakan ikon pariwisata baru. Seperti yang kita tahu Tanjung Benoa merupakan kawasan konservasi yang ada di Bali, Tanjung Benoa merupakan tempat tampungan banjir dari 5 sub-DAS (daerah aliran sungai). Selain itu jika pantai tanjung benoa direklamasi dapat merugikan warga yang beragama hindu. Karena tanjung benoa merupakan tempat yang suci bagi kaum hindu untuk melakukan upacara kematian dan tempat membuangnya abu jasad. Sedangkan dalam agama pun, dijelaskan bahwa manusia hendaknya harus selalu menjaga lingkungan tempat dimana ia tinggal dan dilarang untuk merusak lingkungan. Muncul banyak berbagai Pro dan Kontra atas pembelaan pembenaran masing – masing kelompok. Di Kubu mereka menyetujui revitalisasi Tanjung Benoa namun, masyarakat Bali menolak dengan tegas atas reklamasi tersebut karena dianggap dapat merusak alam dan juga menimbulkan bencana banjir. Penelitian ini tertuju pada masyarakat bali yang teraliansi menjadi gerakan ForBali Penulis ingin melihat peran agama hindu dalam menolak reklamasi Tanjung Benoa dan nilai – nilai agama hindu dalam menyikapi kesadaran lingkungan masyarakat. Tujuan tulisan ini adalah melihat sejauhmana peran agama hindu dalam mempengaruhi penolakan reklamasi Tanjung Benoa dan sebagai bahan bacaan ilmiah untuk pertimbangan studi. Kasus ini menurut penulis menarik untuk diteliti karena terdapat kaitan pembangunan tersebut dengan ajaran agama.

## **Literatur Sejenis**

Penelitian yang dilakukan oleh M. Ridho Ma'arif (2014) yang berjudul “*GERAKAN PERLAWANAN LSM CAGAR TUBAN TERHADAP PEMBANGUNAN PT. HOLCIM INDONESIA*” berisi tentang Gerakan perlawanan yang dilakukan oleh LSM Cagar Tuban merupakan bagian dari usaha penyelamatan lingkungan dari pembangunan PT. Holcim Indonesia<sup>2</sup>. Inti gerakan ini melakukan penolakan terhadap pembangunan PT. Holcim Indonesia yang mengancam keadaan lingkungan, khususnya kawasan tanah kapur. Isu lingkungan menjadi landasan utama dalam melakukan gerakan perlawanan ini. Pola kepemimpinan dari LSM Cagar dalam perlawanan terhadap pembangunan PT. Holcim Indonesia berbasis pada fungsi pendidikan, Pendidikan yang dilakukan oleh Cagar berbentuk forum diskusi bagi masyarakat

---

<sup>2</sup> M. Ridho Ma'arif, *Gerakan Perlawanan Lsm Cagar Tuban Terhadap Pembangunan Pt. Holcim Indonesia*, Jurnal Sosiologi, Vol 2, No 1, (2014), <http://ejournal.unesa.ac.id>.

lokal agar memiliki kekritisian terkait pembangunan industri di lingkungan setempat. LSM Cagar memiliki pengetahuan dan kemampuan yang dapat ditransmisikan kepada masyarakat lokal.

Penelitian oleh Idham Halid, Prabang Setyono dan Sunarto (2014) yang berjudul “IMPLEMENTASI NILAI-NILAI ISLAM DALAM SIKAP RAMAH LINGKUNGAN UNTUK MEWUJUDKAN MASYARAKAT SADAR LINGKUNGAN MELALUI GERAKAN PONDOK PESANTREN”<sup>3</sup>. Berisi tentang Gerakan lingkungan yang dilakukan di pondok pesantren Nurul Haramain NW Narmada dan Nurul Hakim Kediri Lombok Barat, merupakan suatu gerakan lingkungan yang dilatar belakangi oleh motivasi keyakinan dan pengetahuan Agama dalam memenuhi tugas dan kewajiban sebagai mahluk ciptaan Allah SWT (khalifah) di muka bumi. Gerakan lingkungna dimulai pada lingkungan pesantren sendiri untuk mencari perhatian masyarakat, sehingga pada akhirnya meluas ke masyarakat sekitar. Sikap ramah lingkungan di peroleh melalui Penerapan nilai-nilai islam dan pengetahuan umum di lingkungan pesantren dan masyarakat sekitar.

## **Kerangka Teoritik**

### Teori konflik Struktural (Otto Maduro)

Konflik merupakan suatu fenomena alamiah yang tidak mungkin dapat dihindari dalam kehidupan umat manusia, dan terbuti dalam rentang sejarah kehidupan manusia selalu diwarnai dengan konflik. Hal ini dikarenakan watak naluriah manusia yang berbeda dan kerap menimbulkan pertentangan, oleh sebab itu manusia juga disebut dengan makhluk konfliktis (homo conlictus)<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Idham Halid dkk, *Implementasi Nilai-Nilai Islam Dalam Sikap Ramah Lingkungan Untuk Mewujudkan Masyarakat Sadar Lingkungan Melalui Gerakan Pondok Pesantren*, Jurnal Ilmiah Lingkungan Hidup, Vol 6, No 1 (2014), <http://jurnal.pasca.uns.ac.id/>.

<sup>4</sup> Novi Susan, *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontenporer*. (Jakarta Kencana prenada Media Group, 2009), hlm 8.

Perhatian utama dari teori konflik adalah mengenal dan menganalisa kemunculan konflik dalam kehidupan sosial, mulai dari sebab terjadinya konflik, bentuk dari konflik serta akibat yang ditimbulkan dari konflik itu sendiri.<sup>5</sup>

Menurut Maduro, dalam teori konfliknya terdapat dua aktor yang menyebabkan terjadinya konflik yaitu: kaum dominant dan kaum subordinat. Kaum subordinat yang dikatakan maduro adalah mereka yang menguasai aspek ekonomi, politik, pendidikan dll. Penyebab terjadinya konflik yaitu karena pihak yang memiliki kekuasaan lebih untuk mendominasi/mengatur pihak yang kurang memiliki kekuasaan. Namun menurut Maduro, kaum dominated juga berusaha melakukan perlawanan untuk mendapatkan kebebasan baik secara material maupun secara simbolik.<sup>6</sup> Menurut Maduro sebab terjadinya konflik ialah adanya unequal power dan tujuan agama dalam konflik oleh pihak dominant memperluas kekuasaan dan memperdalam sedangkan menurut subordinat ialah dengan cara meningkatkan power sendiri dengan menolak dominasi. Posisi agama dalam teori ini oleh dominan ialah mempertahankan dominasi dan power dengan material dan symbol sedangkan subordinat hanya dengan melawan dominasi. Agama diposisikan sebagai alat perlawanan untuk melawan dominant dan peran agama sebagai doktrin acuan nilai – nilai religius. Strategi agama menurut dominant ialah menundukan semua elemen keagamaan, pembangunan yang disenangi, dan restrukturisasi sedangkan subordinat mendapatkan otonomi religious, kesadaran kelas, organisasi, mobilisasi & aksi.

### **Penyebab Terjadi Reklamasi di Bali<sup>7</sup>**

Pariwisata dan turis telah menjadi subjek penting dalam investasi. Sekarang ini, budaya tradisional, rumah adat, tari-tarian daerah, dan budaya lokal lainnya dilestarikan dengan tujuan untuk menarik wisatawan dan meningkatkan nilai pariwisata suatu daerah khususnya di Bali.

Dengan tujuan untuk meningkatkan pariwisata, maka Pemerintah Bali sejak tahun 2009 berencana untuk mereklamasi Tanjung Benoa dengan membuat pulau baru yang akan dijadikan

---

<sup>5</sup> Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi: klasik dan modern – jilid II*, terj. Robert M. Z. Lawang (Jakarta: Gramedia, 1986), hlm 162).

<sup>6</sup> PDF Maduro chapt. 16, 17, 33

<sup>7</sup> Dicatat berita dari [www.forbali.org](http://www.forbali.org) diakses pada 14 Mei 2015 pukul 13.20 WIB.

kawasan marine (Komando Koperasi Angkatan Laut) dan wisata terpadu, serta ditunjang dengan infrastruktur berkelas. Kawasan yang akan direklamasi salah satunya termasuk Pulau Pudut atau Pulau Penyu dan akan dikembangkan menjadi kawasan wisata, kawasan marine, termasuk sirkuit balap F1 (Formula One) bertaraf internasional, serta beberapa jasa wisata lainnya.

Pada tahun 2013 lalu rencana reklamasi Tanjung Benoa kembali muncul dengan membawa nama investor baru yaitu PT Tirta Wahana Bali Internasional. Rencana ini telah dikaji Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Udayana (Unud). Terkait dengan rencana reklamasi ini, banyak anggota masyarakat menolak, salah satunya dengan alasan rencana reklamasi bertentangan dengan master plan pembangunan Bali yang tertuang dalam Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Bali Nomor Tahun 2009, Perda RTRWP Badung, Perpres Nomor 45/2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan), Rencana Induk Pengembangan Pelabuhan Benoa, serta Moratorium Penambahan Kamar Hotel di Bali Selatan.

Penolakan dari masyarakat semakin jelas setelah Gubernur Bali Mangku Pastika mengakui telah mengeluarkan SK untuk program reklamasi Teluk Benoa. Menurut Gubernur Bali dan pemerintah Bali jika reklamasi itu akan mampu menampung 10 juta wisatawan yang akan datang ke Bali lima tahun mendatang, dan akan terbuka lapangan kerja untuk 200.000 orang serta PHR sebanyak Rp 5 miliar per hari dari transaksi di pulau baru tersebut.

Lahirnya Perpres No. 51 tahun 2014 di akhir Mei seolah menjadi babak baru dalam perjuangan menjaga Bali dari reklamasi. Bagaimana tidak, dalam Perpres ini wilayah Teluk Benoa yang dulunya merupakan zona L3 atau konservasi (Perpres No. 45 tahun 2011), kini masuk dalam zona P atau penyangga. Dalam zona ini terdapat kegiatan kegiatan yang di perbolehkan seperti kegiatan kelautan, perikanan, pariwisata, pengembangan, ekonomi, pemukiman bahkan penyelenggaraan reklamasi.

Pada Intinya penerbitan Perpres No. 51 Tahun 2014 ini menghapuskan pasal-pasal yang menyatakan Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi sebagaimana yang disebutkan di dalam pasal 55 ayat 5 Perpres No. 45 Tahun 2011. Serta mengubah kawasan konservasi perairan pesisir Teluk Benoa menjadi zona penyangga, yang secara tegas di muat dalam pasal 63A ayat (2)

Perpres No. 51 tahun 2014 yang berakibat pada dapat di reklamasiya teluk benoa (pasal 101A Perpres No. 51 tahun 2014). Bahkan luas wilayah yang dapat di reklamasi pun telah di tentukan, yakni maksimal seluas 700 hektar.

Selain klausul yang mengijinkan kegiatan revitalisasi termasuk penyelenggaraan reklamasi, Perpres No. 51 tahun 2014 juga mengurangi luasan kawasan konservasi perairan dengan menambahkan frasa “sebagian” pada pasal 55 Perpres No. 51 tahun 2014. Lahirnya Perpres No. 51 tahun 2014 ini seolah menjadi jalan bebas hambatan untuk di langsungnya reklamasi di Teluk Benoa.

### **Penolakan Warga Terhadap Reklamasi<sup>8</sup>**

Masyarakat Bali dengan tegasnya menolak reklamasi yang akan dilakukan di Tanjung Benoa. Semua warga serempak mengatakan tidak bukan hanya warga sipil saja tetapi para seniman, rohaniawan, mahasiswa dan juga band – band dari bali menolak reklamasi tersebut. Terdapat banyak baliho dari berbagai gerakan tolak reklamasi salah satunya dari Koordinator Gerakan Pemuda Jembrana (GPJ) I Gusti Ngurah Jelantik, mengatakan, para pemuda di Dauhwaru bukan hanya ikut-ikutan, melainkan penolakan itu berdasar atas kepedulian mereka terhadap lingkungan. Karena itu dalam baliho itu dituliskan 10 alasan mengapa para pemuda menolak reklamasi.

Sepuluh alasan itu, pertama, akan muncul banjir, karena Tanjung Benoa merupakan muara bagi sungai-sungai di Bali Selatan. Apabila muara itu tidak ada, bukan tidak mungkin terjadi banjir. Kedua hilangnya paru-paru kota, hutan mangrove di sekitar Tanjung Benoa menjadi paru-paru kota dan jika ditebang, maka kualitas udara akan menurun. Alasan ketiga, Mengorbankan alam. Teluk benoa termasuk wilayah konservasi yang harus dilindungi. Keempat, reklamasi Tanjung Benoa akan mengubah arus air laut sehingga memperparah abrasi pantai lain di sekitarnya. Lima, menambah krisis air di mana Bali Selatan sudah kekurangan air bersih hingga 7,5 miliar kubik per tahunnya, penambahan hotel di Bali Selatan membuat warga semakin kekurangan air. Keenam, pembangunan fasilitas pariwisata di atas lahan hasil reklamasi

---

<sup>8</sup> Diringkas dari berita di <http://balipost.com/read/lingkungan/2014/08/31/20254/10-alasan-tolak-reklamasi-teluk-benoa.html> diakses pada 14 Mei 2015 pukul 14.00 WIB.

jelas tidak stabil, ibarat gelas di atas tumpukan buku, lebih mudah hancur jika ada gempa apalagi tsunami.

Ketujuh, adanya ketidakseimbangan pembangunan di Bali, Bali Selatan sudah terlalu penuh dengan pembangunan pariwisata, ketika daerah utara dan timur tidak diperhatikan. Reklamasi Tanjung Benoa hanya memperparah ketidakseimbangan pembangunan itu. Kedelapan, penambahan hotel akan membuat tingkat hunian makin rendah, saat ini Bali sudah memiliki 90.000 kamar hotel, vila dan penginapan dengan rata-rata okupansi hanya 31-51 persen. Alasan ke sembilan, sudah saatnya Bali serius menggarap pariwisata berbasis kerakyatan, bukan pariwisata massal yang hanya menguntungkan investor rakus yang ingin merusak alam Bali.

Alasan kesepuluh adalah ancaman gagal megaprojek seperti yang sebelumnya yang pernah dicanangkan. Banyak contoh rencana megaprojek di Bali, namun gagal seperti Taman Festival di Padanggalak, Bali Turtle Island Development (BTID) di Serangan, serta Pecatu Graha di Pecatu. Itulah 10 alasan warga Bali menolak reklamasi Tanjung Benoa. Selain dari GPJ ada juga salah satu gerakan yang paling terkenal menolak reklamasi Tanjung Benoa yaitu ForBali.

## **Sejarah ForBali**

ForBALI adalah aliansi masyarakat sipil lintas sektoral yang terdiri dari gerakan mahasiswa, LSM, musisi, seniman, dan individu-individu yang peduli lingkungan hidup dan mempunyai keyakinan bahwa perencanaan reklamasi seluas 838 hektar di Teluk Benoa adalah bagian dari kebijakan penghancuran Bali<sup>9</sup>. ForBali juga sudah banyak mewadahi aksi dukungan untuk tolak reklamasi yang dipionerkan oleh musisi SID Jerinx. Gerakan ini sudah bergerak secara massive sejak tahun 2013 dan sampai saat ini pengikut di Twitter sudah mencapai angka 35 ribu followers. Melalui gerakan ini merupakan strategi agama yang dapat dipilih seperti kata Maduro dengan adanya kesadaran kelas dan doktrin dari agama. Organisasi atau wadah perkumpulan untuk menolak reklamasi ini merupakan salah satu aksi yang paling ampuh untuk melumpuhkan pihak dominant. Disisi kapitalis yang semakin mengembangkan sayapnya dengan

---

<sup>9</sup> Diakses dari [www.forbali.org](http://www.forbali.org) pada 14 Mei 2015 pukul 14.25 WIB.

mempertahankan dominasi dan juga kekuasaan yang dimilikinya sedangkan pihak subordinat yang disini diwadahi oleh ForBali yang melawan kapitalis untuk menolak reklamasi Tanjung Benoa.

Yang tergabung dalam ForBALI antara lain:

FRONTIER (Front Demokrasi Perjuangan Rakyat Bali ), KEKAL (Komite Kerja Advokasi Lingkungan Hidup Bali), GEMPAR Teluk Benoa (Gerakan Masyarakat Pemuda Tolak Reklamasi Teluk Benoa), WALHI Bali, Sloka Institute, Mitra Bali, PPLH (Pusat Penelitian Lingkungan Hidup) Bali, PBHI (Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia) Bali, Kalimajari, Yayasan Wisnu, Manikaya Kauci, Komunitas Taman 65, Komunitas Pojok, Bali Outbound Community, Penggak Men Mersi, BEM Universitas Hindu Indonesia (UNHI) Bali, PPMI DK Denpasar, Eco Defender, Nosstress, The Bullhead, Geekssmile, Superman Is Dead, Navicula, Devildice, Dialog Dini Hari, Ganjil, Nymphaea, The Dissland, The Sneakers, The Hydrant, Goldvoice, Rootsradical, The Brews, Blackened, Ripper Clown, Scared of Bumbs, Suicidal Sinatra, Ugly Bastard, Steel Bone Rigid, Rollfast, Suitcase for Kennedy, Tha Kantin, Ska Teenagers Punk, Durhaka, Refugee, Hyena Wants a Party, Patrick The Bastard, The Room, Billy Bob Cats, serta individu-individu yang peduli keselamatan Bali.

### **Peran Agama Hindu di ForBali Dalam Menolak Reklamasi Bali**

Kita tahu bahwa sudah banyak gerakan yang mengatasnamakan tolak reklamasi Bali tetapi dimana peran agama berada? Sebenarnya agama dalam hal ini sudah mengalir menginternalisasi ke jiwa ideologi masyarakat. Sebelum mereka bergerak melalui gerakan masyarakat yang terlebih dahulu ditanamkan adalah nilai agama seperti yang penulis kutip dari cakrawayu.org yang memiliki visi mewujudkan bali harmonis berlandaskan agama hindu dan tradisi bali. Artinya segala misi yang dilakukan oleh organisasi rohaniawan hindu ini berlandaskan atas nilai agama dan budaya Bali salah satunya memperkuat sradha bhakti agama hindu. Jadi sradha dan bhakti dapat diartikan keyakinan dan kecintaan kita terhadap Ide Sang Hyang Widhi Wase.



Mari kembali kita lihat permasalahan ini dari awal. Dalam kasus reklamasi Bali ini pihak yang berkonflik adalah pemerintah dengan masyarakat Bali. Sebenarnya pihak utama yang ingin mereklamasi adalah kaum kapitalis namun dengan kekuatan dan kepemilikan modal yang besar mereka bisa mengontrol pemerintah sehingga bisa merubah perpres yang tadinya menyatakan kawasan Teluk Benoa merupakan kawasan konservasi menjadi kawasan yang diperbolehkan untuk dikelola disegala bidang. Tentu saja masyarakat Bali yang disini sebagai subordinat menolak dengan tegas rencana reklamasi Teluk ini karena menurut mereka kawasan ini adalah kawasan yang penting terhadap lingkungan apabila direklamasi maka akan timbul bencana baru. Masyarakat Bali prihatin dengan keadaan ini. Dengan kesadaran kelas yang ada mereka menciptakan gerakan penolakan reklamasi Bali yang diberi nama ForBali. ForBali terbentuk memang karena terciptanya aksi dari masyarakat yang berawal dari media sosial kemudian merebak ke isu publik untuk melawan kaum dominan dalam membela penolakan reklamasi Bali.

ForBali memposisikan agama sebagai doktrin terhadap masyarakat lewat agama hindu yang telah ditanamkan ke masyarakat Bali untuk melawan dominasi kapitalis dan pemerintah yang mempertahankan dominasinya melalui material dan simbol. Strategi ForBali untuk melawan dominasi pemerintah lewat agama hindu dikatakan cukup berhasil yaitu menciptakan kesadaran kelas kemudian mampu memobilisasi masyarakat lewat aksi dengan cara berbagai hal bahkan pergerakan mereka sudah mencapai luar negeri di Australia dan Washington DC. Aksi yang dilakukan ForBali diantaranya mulai dari teater, musik, puisi, kampanye, aksi sosial, dan media sosial. Tentu saja aksi mereka terinternalisasi dari agama hindu seperti puisi yang dibawakan Iwan Gendo salah satu seniman Bali yang memiliki makna puisi hilangnya hak alam yang dibekukan oleh manusia. ForBali sendiri memiliki pemangku yaitu ulama agama hindu untuk memberikan kajian rohani kepada masyarakat Bali sehingga diharapkan terciptanya persatuan dalam perjuangan ini. Bukan berarti non hindu tidak boleh ikut dalam aksi ini justru diajak untuk menyuarakan menolak reklamasi agar suara aspirasi rakyat terdengar hingga istana. Masyarakat Bali selalu berdoa kepada Dewa laut untuk memberikan solusi yang terbaik bagi umat hindu di Bali dan juga memohon agar Dewa tidak marah dengan perilaku umatnya. Salah

satu strategi lewat agama hindu ialah diterapkannya Sradha dan bhakti kepada Ide Sang Hyang Widi Wase dengan melalui 3 jalan yang ada dalam diri manusia, yaitu<sup>10</sup>:

- a. Jnana Yoga yang Berarti Pikiran (Ilmu Pengetahuan)
- b. Bhakti Yoga yang Berarti Keyakinan Kita terhadap Ide Sang Hyang Widhi Wase
- c. Karma Yoga yang Berarti Kerja atau Pelayanan

Dengan adanya tiga jalan tersebut dapat memberikan aturan dan jalan kepada masyarakat Bali agar tertuju pada jalan itu. Perilaku manusia yang seharusnya yaitu seperti yang tertera pada Sradha dan bhakti kepada Ide Sang Hyang Widi Wase.

### **Landasan Nilai Agama Hindu Dalam Menolak Reklamasi Bali**

Bali adalah pulau suci bagi agama hindu dan juga satu – satunya tempat wisata yang paling banyak didatangi turis di Indonesia. Tetapi, dibalik keunggulan itu terdapat luka yang datang dari negerinya sendiri. Penjajahan oleh pihak kapitalis yang akan mereklamasi Tanjung Benoa seakan akan melupakan janji Lontar bagi para pemangku agama hindu. Bagi agama hindu terdapat tiga keharmonisan yang harus dijaga yaitu Tri Hita Karana, antara lain<sup>11</sup>:

#### **I. Dari Sisi Parahyangan (Konsep Ketuhanan Hindu dan Agama)**

1. Air dalam agama Hindu adalah sakral dan suci sehingga tidak sembarangan bisa memperlakukan air yang sudah ada di alam ini untuk kita perlakukan dengan kehendak kita. Apalagi di Bali, yang merupakan pulau yang sangat bergantung pada air. Diantara air yang disucikan oleh Agama Hindu adalah air danau, air sungai, air campuhan dan air laut. Tanjung benoa adalah bagian sumber air yang disucikan, karena air yang ada disini bukanlah air sembarang yang kita ciptakan sendiri, tapi berasal dari perpaduan sumber air laut (kuasa dari Sanghyang Baruna) dan air sungai (kuasa dari Dewi Gangga). Melakukan manipulasi terhadap air ini berarti berurusan tidak cuma dengan manusia yang masih memanfaatkannya, tapi juga

---

<sup>10</sup> Drs.Ida Bagus Sudirga, dkk, *Widya Dharma Agama Hindu*, Ganesa Exact: Jakarta, 2007, Hlm. 3.

<sup>11</sup> Diringkas dari [www.hindunesia.org](http://www.hindunesia.org) pada 14 Mei 2015 pukul 17.00 WIB

dengan para penguasa air yang disebutkan diatas. Konsep ketuhanan ini menjadi gambaran akan tujuan agama sebagai konflik yaitu untuk menolak pihak dominasi. Dengan adanya konsep ini masyarakat dapat terdoktrin dengan ajaran – ajaran hindu yang nantinya akan membawa penolakan yang lebih besar lagi di Bali.

2. Reklamasi Teluk Benoa akan mengakibatkan kesakralan tempat-tempat suci yang ada disekitar tempat itu akan berkurang, karena dipengaruhi aktifitas dari pemanfaatan lahan reklamasi yang tidak memberikan kenyamanan (leteh) pada tempat-tempat suci disekitarnya seperti Pura Candi Narmada, Pura Sakenan, Pura Dalem Peed, dsb. Kita tidak akan bisa mengedalikan pemanfaatan dan kegunaan setelah dikuasai oleh pemodal, sehingga kendali kebijakan apapun akan bisa diloloskan dengan dalih sudah menjadi hak dari pemegang ijin tersebut. Pemodal disini yaitu pihak pengembang proyek PT. TWBI dengan strateginya yaitu membangun seenaknya yang mereka senangi karena kasus ini seperti apa yang Maduro katakan melalui strategi agama pihak dominant dapat melakukan pembangunan yang disenangi.

3. Reklamasi akan berdampak pada terjadinya abrasi pada tempat-tempat parahyangan lain yang ada di Bali seperti di wilayah Denpasar (Pura Sakenan, Pura Candi Narmada, Pura Segara, Pura Padanggalak), wilayah Gianyar (Pura Masceti, Pura Batu Klotok), Jembrana (Pura Purancak), dan banyak Pura-Pura yang ada di sepanjang pesisir terancam akan tidak bisa kita temukan lagi. Oleh karena itu, perlawanan rakyat Bali sangat penting dalam menolak reklamasi ini dengan cara beraliansi dengan lembaga masyarakat yang bernaung di bidang lingkungan dan sosial budaya.

## **II. Dari Sisi Pawongan (Sosial, Ekonomi, Pertahanan dan Budaya)**

1. Dampak sosial akan sangat besar bila reklamasi dan pemanfaatan lahan ini terjadi. Kesenjangan antara wilayah Bali selatan yang terkonsentrasi dengan jumlah sarana pariwisata yang “over supply” dengan wilayah Bali lainnya akan semakin membuat pembangunan Bali tidak merata dan tidak seimbang. Kecemburuan sosial akan semakin meruncing dan mengakibatkan hilangnya rasa “sagilik saguluk sabayantaka” karena semua merasa berhak dan sikap “individualistik” akan semakin meningkat yang berujung pada “mati ci hidup kai” (hidup sendiri-sendiri). Oleh karena itu, peranan agama hindu melalui peribadatan sangat penting untuk

menolak reklamasi. Hal itu terjadi karena apabila nilai iman masyarakat warga Bali sudah pudar maka dengan mudah ditembus dari pihak luar.

2. Hubungan harmoni desa pekraman yang ada di wilayah reklamasi dengan di luar daerah reklamasi terutama yang kena dampak negatifnya (abrasi) akan renggang sehingga memungkinkan untuk munculnya “ego sektoral” di antara desa pekraman yang berujung pada konflik yang tidak berkesudahan. Konflik ini yang paling disenangi kapitalis karena jika berhasil berarti tujuan mereka sudah sukses. Persatuan desa pekraman di Bali akan terpecah-pecah dan mudah menjadi sumber kehancuran sistem sosial di Bali kecuali persatuan itu semakin menyatu dengan bersatu melawan pihak kapitalis.

3. Reklamasi dan proyek ikutannya akan menjadikan sistem ekonomi Bali yang bertumpu pada Pariwisata Budaya akan melemah dan cenderung memburuk karena semua titik-titik sebaran distribusi tujuan wisata tidak akan merata. Satu wilayah akan penuh dengan wisatawan, sedangkan wilayah lain hanya akan menikmati pepesan kosong dan menjadi obyek untuk dinikmati. Kecuali masyarakat Bali bisa memposisikan agama sebagai kesadaran kelas untuk melawan kaum dominant. Konsep ini sangat bertentangan dengan cita-cita almarhum Prof. Dr. Ida Bagus Mantra untuk menjadikan Pariwisata Budaya Bali yang berbasis Komunitas (Masyarakat Bali), bukan berbasis kekuasaan investor.

4. Pertahanan Bali akan lemah, karena dipastikan arus tenaga kerja dari luar Bali dan dari luar negeri akan membludak sehingga desa pekraman hanya akan menjadi simbol adat, bukan lagi benteng pertahanan untuk menjaga Budaya, Tradisi dan Agama Hindu di Bali. Apalagi AFTA 2015 memungkinkan untuk menggunakan tenaga asing dengan bebas. Persaingan akan terjadi dan kita tidak akan siap untuk menghadapinya. Untuk mengantisipasi hal itu yang terpenting ialah menggagalkan reklamasi karena jika reklamasi berhasil maka akan membuka efek domino negatif ke masyarakat Bali. Menanamkan nilai budaya hindu ke anak secara dini membuat setidaknya penanaman nilai agama tertanam dan mengalir di tubuhnya. Dominasi orang luar Bali akan menjadikan Bali tidak lagi murni bisa melaksanakan tata cara orang Bali sehingga lama kelamaan akan mempengaruhi budaya orang Bali.

### **III. Dari Sisi Palemahan (Kerusakan Lingkungan, Abrasi & Rusaknya Konsep Tatanan Palemahan)**

1. Dampak reklamasi pada kerusakan lingkungan sangat pasti karena sudah menghancurkan dan menimbun biota dan ekosistem laut dan mangrove yang selama ini menjadi tempat mereka berkembang dan menjadi pelindung pesisir pantai di wilayah sekitar. Hal itu sangat diluar ajaran agama hindu yang menuhankan alamnya sebagai dewa alam karena hidup di dunia itu harus bersinergi dengan manusia dan alam juga jadi jika alam hancur maka bumi pun sama hancurnya.

2. Data dari Balai Wilayah Sungai Bali-Penida Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Departemen Pekerjaan Umum di Denpasar mencatat, tahun 2009 abrasi terjadi di sepanjang 181,70 kilometer dari total panjang pantai di Bali 437,70 km.<sup>12</sup> Tahun 1987 abrasi di Bali tercatat terjadi di sepanjang 49,95 km. Artinya, dalam waktu lebih dari 20 tahun terjadi penambahan abrasi sepanjang 131,75 km garis pantai atau rata-rata 5,98 km per tahun. Dari segi kewilayahan, abrasi yang terjadi di pantai Bali mengakibatkan kerusakan infrastruktur pariwisata, lahan pertanian, dan kawasan suci, misalnya, Pantai Kuta (Kabupaten Badung), Pantai Sanur dan Pantai Padanggalak (Denpasar), Pantai Lebih (Gianyar), Pantai Candidasa dan Pantai Ujung (Karangasem), Pantai Lovina (Buleleng), serta Pantai Cupel dan Banyumala (Jembrana). Dari berbagai kerusakan infrastruktur pariwisata masyarakat Bali dapat membenahinya dengan cara upacara peribadatan. Seperti kita tahu tradisi umat hindu Bali sangat dekat dengan alam dan bumi. Dalam reklamasi ini, perlawanan agama hindu dengan ritual berdoa terhadap dewa – dewa dengan memohon ketenangan dan ketentraman yang akan terancam oleh reklamasi.

3. Dengan terkonsentrasinya proyek-proyek besar milik investor, otomatis akan mendorong semakin banyak orang Bali di sekitar sana untuk menjual tanah, karena harga tanah yang menjanjikan mereka untuk mendapatkan hidup yang layak tanpa memikirkan generasi mereka ke depan, yang sudah tidak memiliki lahan. Namun, muncul doktrin dari agama hindu yang mendorong masyarakat Bali untuk tidak mudah menjual tanah mereka kepada investor. Karena ajaran hindu mengajarkan keutuhan keagamaan daripada keuntungan dunia semata yang hanya cenderung mementingkan profit terhadap kapitalis. Penguasaan lahan berarti penguasaan hak

---

<sup>12</sup> Diambil data dari <http://sda.pu.go.id/> pada 14 Mei 2015 pukul 15.03 WIB.

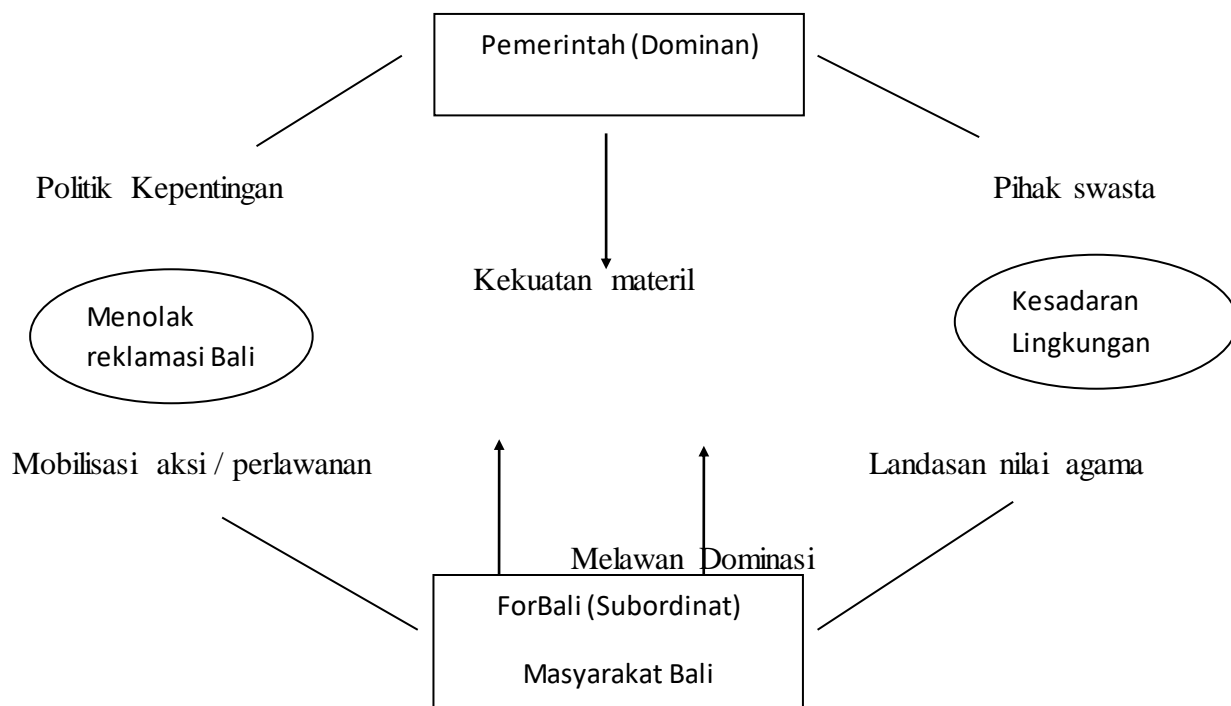
atas segala yang ada diatasnya. Hilangnya lahan, berarti sama dengan hilangnya sistem yang ada disana karena bertahannya orang Bali dengan budaya, tradisi dan ritualnya karena mereka memiliki dan menguasai lahan untuk dikelola.

## **Kesimpulan**

Lingkungan hidup yang kita cintai ini sudah sepatutnya diperhatikan karena apabila didiamkan begitu saja sudah menjadi incaran para kapitalis yang hanya mementingkan kepentingannya saja dan semata – mata meraih profit dari proyek itu. Barulah kita sadar apabila lingkungan kita ini mulai dirampas oleh manusia yang berkuasa, dengan kekuasaan yang mereka miliki akan mudah memperlancar jalan mereka untuk mengambil apa yang mereka inginkan karena pada dasarnya kapitalis hanya tahu bahwa apa yang mereka senangi maka itulah yang harus didapat. Begitu pula dengan nasib Tanjung Benoa ini, nasibnya ditentukan di tangan kita. Walaupun, timbul Pro Kontra dalam kasus ini banyak yang menolak namun ada juga yang menyetujui. Padahal mereka sama – sama dari Pulau Bali mereka memiliki budaya dan agama yang sama tetapi apa yang membedakan? Yaitu ideologi. Bagi masyarakat yang pro terhadap reklamasi otaknya sudah dicuci dengan paham – paham kapitalis yang secara laten melegalkan reklamasi yang tanpa melihat aspek negatifnya. Lalu, bagi yang kontra mereka membuat aliansi pergerakan yang terdiri dari banyak organisasi untuk melawan kaum kapitalis. Karena tanpa adanya reklamasi pun Bali sudah maju di bidang pariwisata dan yakin tidak akan kalah saing dengan Negara lain daripada harus mengorbankan lingkungannya yang sekaligus sebagai tempat peribadatan umat hindu.

Agama hindu yang sebagai agama terlama di dunia sendiri pun mengatakan bahwa segala sesuatu yang berhubungan merusak alam itu adalah hal yang melanggar janji lontar. Sebab dalam ajaran hindu terdapat tiga jalan sradha bhakti sebagai cerminan masyarakat yang taat kepada Ide

Sang Hyang Widhi Wase. Dijelaskan dari ketiga jalan tersebut bagaimana seharusnya manusia di muka bumi dan jalan itu memberikan pencerahan kepada masyarakat untuk menolak reklamasi Bali. Selain itu, agama hindu juga memiliki tiga janji keharmonisan yang harus dijaga ditengah hantaman globalisasi dan homogenisasi yaitu Tri Hita Karana. Dalam Tri Hita Karana, manusia terikat tiga hubungan, yaitu hubungan dengan sesama manusia (pawongan), hubungan dengan alam sekelilingnya (palemahan), dan hubungan dengan ketuhanan (parahyangan) yang saling terkait dan harus seimbang serta harmonis agar manusia dapat mencapai kesejahteraan berkelanjutan. Tri Hita Karana mengajarkan norma, nilai, dan aturan perilaku yang harus ditaati manusia dalam relasinya. Oleh karena itu, kita sebagai manusia seharusnya bersikap lebih terbuka akan wawasan lingkungan dan juga mengetahui arti lingkungan dalam ajaran agama. Khususnya bagi warga Bali yang mayoritas penduduknya beragama hindu marilah kuatkan iman dan satukan pikiran akan keberlangsungan hidup. Bahwa sejatinya hidup bukan hanya untuk bumi saja tapi juga untuk alam, bersatulah dengan alam maka alam akan menyatu dengan kita bukan dengan cara merampasnya.



## **Daftar Pustaka**

### **Buku:**

Doyle Paul Johnson, Teori Sosiologi: klasik dan modern – jilid II, terj. Robert M. Z. Lawang (Jakarta: Gramedia, 1986), hlm 162).

Drs. Ida Bagus Sudirga, dkk, Widya Dharma Agama Hindu, Ganesa Exact: Jakarta, 2007, Hlm. 3.

Novi Susan, Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm 8.

PDF Maduro chapt. 16, 17, 33

### **Dokumen:**

Dilihat di SK menteri Kependudukan Lingkungan Hidup No 2/MENKLH/1988

SK Menteri Kependudukan Lingkungan Hidup No 2/MENKLH/1988

### **Jurnal:**

Idham Halid dkk, Implementasi Nilai-Nilai Islam Dalam Sikap Ramah Lingkungan Untuk Mewujudkan Masyarakat Sadar Lingkungan Melalui Gerakan Pondok Pesantren, Jurnal Ilmiah Lingkungan Hidup, Vol 6, No 1 (2014), <http://jurnal.pasca.uns.ac.id/>.

M. Ridho Ma'arif, Gerakan Perlawanan Lsm Cagar Tuban Terhadap Pembangunan Pt. Holcim Indonesia, Jurnal Sosiologi, Vol 2, No 1, (2014), <http://ejournal.unesa.ac.id>.

M. Ridho Ma'arif, Gerakan Perlawanan Lsm Cagar Tuban Terhadap Pembangunan Pt. Holcim Indonesia, Jurnal Sosiologi, Vol 2, No 1, (2014), <http://ejournal.unesa.ac.id>.

### **Internet:**

Dicatat berita dari [www.forbali.org](http://www.forbali.org) diakses pada 14 Mei 2015 pukul 13.20 WIB.

Diringkas dari berita di <http://balipost.com/read/lingkungan/2014/08/31/20254/10-alasan-tolak-reklamasi-teluk-benoa.html> diakses pada 14 Mei 2015 pukul 14.00 WIB.

Diakses dari [www.forbali.org](http://www.forbali.org) pada 14 Mei 2015 pukul 14.25 WIB.

Diringkas dari [www.hindunesia.org](http://www.hindunesia.org) pada 14 Mei 2015 pukul 17.00 WIB

Diambil data dari <http://sda.pu.go.id/> pada 14 Mei 2015 pukul 15.03 WIB